



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan Kutai Barat terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) dana perimbangan, dan (3) pendapatan lain-lain yang sah. Dari ketiga komponen tersebut, pendapatan Kutai Barat memiliki proporsi komponen dana perimbangan masih sangat besar dan proporsi komponen PAD tergolong kecil. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kutai Barat yang cukup tinggi terhadap pendapatan dari luar daerah.

Pendapatan Kutai Barat sepanjang 2011-2015 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Sepanjang tahun tersebut, terjadi kenaikan pendapatan yang cukup besar pada 2011-2012 yaitu dari 1,7 trilyun menjadi 2,2 trilyun naik sebesar 29,80%. Kenaikan yang cukup besar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dana perimbangan yang cukup besar. Komponen lain yang juga menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi pada 2011-2012 adalah komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, dari 190 milyar di tahun 2011 menjadi 307 milyar di tahun 2012. Namun, pendapatan tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2013-2014 dari 2,2 trilyun menjadi hanya 1,7 trilyun atau turun sebesar 24,36% meskipun di tahun 2015 kembali naik cukup tinggi menjadi 2,06 trilyun. Penurunan yang tajam di tahun 2013-2014 terjadi karena penurunan pada pos dana perimbangan dari 1,95 trilyun menjadi hanya 1,29 trilyun atau turun sekitar 34%. Rata-rata pendapatan daerah Kutai Barat 2011-2015 setiap tahun sebesar Rp2,005,686,037,182.05.

Tahun 2015 pendapatan Kutai Barat mencapai Rp2,06 trilyun. Dari pendapatan sebesar itu, rata-rata pendapatan yang bersumber dari PAD mencapai sekitar Rp81,58 milyar. Dari komponen PAD sebesar itu, komponen dari lain-lain PAD yang sah memberikan sumbangan terbesar yaitu sekitar Rp58,97milyar serta pajak daerah sebesar Rp15,19 milyar. Komponen retribusi daerah dalam proporsi PAD memberikan andil yang terkecil yaitu rata-rata Rp4,7milyar. Untuk pajak, terlihat adanya penurunan lebih dari dua kali lipat dari 2014 ke 2015 dari Rp43,19 milyar menjadi Rp15,19 milyar.



Peran dana perimbangan masih mendominasi APBD Kutai Barat. Kontribusi dana perimbangan dalam APBD selama 2011-2015 rata-rata mencapai Rp1,6trilyun. Kondisi ini menggambarkan besarnya peran pemerintah dalam pembentukan APBD. Upaya peningkatan APBD melalui PAD dalam jangka perlu diintensifkan untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerah. Dari dana perimbangan sebesar itu, komponen dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sangat dominan.

Salah satu hal yang menarik adalah pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap belanja. Misalnya, pada tahun 2013 terjadi peningkatan pendapatan sebesar 1,69% namun pada periode yang sama belanja daerah justru naik sebesar 25,21%. Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi kenaikan pendapatan sebesar 15,20% namun untuk belanja mengalami kenaikan sebesar 17,26%.



Tabel 3.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Kutai Barat 2011-2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
PENDAPATAN	1,707,870,654,570.53	2,216,910,136,362.35	2,254,576,623,858.38	1,788,598,932,508.50	2,060,473,838,610.48	2,005,686,037,182.05
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,691,299,465.53	67,904,531,799.35	88,616,089,135.38	106,501,576,994.50	81,584,683,016.48	81,059,636,082.25
Pajak Daerah	14,989,879,664.09	14,931,966,376.52	16,365,003,934.45	43,199,234,706.89	15,197,324,195.20	20,936,681,775.43
Retribusi Daerah	9,759,464,639.85	9,849,706,059.10	15,875,770,496.43	2,389,677,963.10	2,700,387,506.16	8,115,001,332.93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,314,862,140.29	4,920,401,217.25	5,618,348,306.66	5,703,570,645.84	4,709,896,173.44	5,253,415,696.70
Lain-lain PAD yang Sah	30,627,093,021.30	38,202,458,146.48	50,756,966,397.84	55,209,093,678.67	58,977,075,141.68	46,754,537,277.19
DANA PERIMBANGAN	1,457,148,173,505.00	1,841,291,143,713.00	1,955,528,934,723.00	1,295,021,217,664.00	1,557,481,084,006.00	1,621,294,110,722.20
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,457,148,173,505.00	1,841,291,143,713.00	1,768,419,499,473.00	1,295,021,217,664.00	1,557,481,084,006.00	1,583,872,223,672.20
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	971,210,016,505.00	1,233,149,395,713.00	1,064,587,519,473.00	735,696,882,664.00	975,504,259,006.00	996,029,614,672.20
Dana Alokasi Umum	437,649,157,000.00	535,530,298,000.00	599,731,060,000.00	468,645,135,000.00	493,715,342,000.00	507,054,198,400.00
Dana Alokasi Khusus - Non DR	48,289,000,000.00	72,611,450,000.00	104,100,920,000.00	90,679,200,000.00	35,733,524,000.00	70,282,818,800.00
Dana Alokasi Khusus - DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alokasi Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	52,527,959,000.00	10,505,591,800.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0.00	0.00	35,243,194,500.00	0.00	0.00	7,048,638,900.00
Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian	0.00	0.00	35,243,194,500.00	0.00	0.00	7,048,638,900.00
Transfer Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	151,866,240,750.00	0.00	0.00	30,373,248,150.00
Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	151,866,240,750.00	0.00	0.00	30,373,248,150.00



URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	190,031,181,600.00	307,714,460,850.00	210,431,600,000.00	387,076,137,850.00	421,408,071,588.00	303,332,290,377.60
Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	101,491,729,000.00	123,967,367,000.00	0.00	138,343,364,850.00	132,444,854,950.00	99,249,463,160.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33,018,252,600.00	0.00	0.00	37,919,073,000.00	45,062,166,638.00	23,199,898,447.60
Bantuan Keuangan Provinsi	55,521,200,000.00	152,515,459,850.00	0.00	210,813,700,000.00	243,901,050,000.00	132,550,281,970.00
Lain-lain Pendapatan yang sah	0.00	0.00	210,431,600,000.00	0.00	0.00	42,086,320,000.00

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat



Total PAD Kutai Barat sepanjang 2011-2015 rata-rata hanya memberikan kontribusi 4,09% terhadap total pendapatan. Bila dibandingkan dengan dana perimbangan, peran PAD dalam APBD masih sangat kecil. Dana perimbangan rata-rata memberikan kontribusi sebesar 80,62%. Peran PAD dalam kurun waktu 2011-2014 meski relatif kecil, namun menunjukkan tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 7,68%. Dari sisi proporsi PAD terhadap pendapatan, sempat menurun pada tahun 2012 dan tahun 2015, penurunan ini disebabkan karena terjadinya penurunan pada semua komponen PAD pada tahun tersebut.

Tabel 3.2.
Proporsi Pendapatan Kutai Barat

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
PENDAPATAN (A+B+C)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.55	3.06	3.93	5.95	3.96	4.09
Pajak Daerah	0.88	0.67	0.73	2.42	0.74	1.09
Retribusi Daerah	0.57	0.44	0.70	0.13	0.13	0.40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.31	0.22	0.25	0.32	0.23	0.27
Lain-lain PAD yang Sah	1.79	1.72	2.25	3.09	2.86	2.34
B. DANA PERIMBANGAN	85.32	83.06	86.74	72.40	75.59	80.62
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	85.32	83.06	78.44	72.40	75.59	78.96
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	56.87	55.62	47.22	41.13	47.34	49.64
Dana Alokasi Umum	25.63	24.16	26.60	26.20	23.96	25.31
Dana Alokasi Khusus - Non DR	2.83	3.28	4.62	5.07	1.73	3.50
Dana Alokasi Khusus - DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alokasi Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.51
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.31
Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.31
Transfer Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	1.35
Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	1.35
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11.13	13.88	9.33	21.64	20.45	15.29
Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	5.94	5.59	0.00	7.73	6.43	5.14
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.93	0.00	0.00	2.12	2.19	1.25
Bantuan Keuangan Provinsi	3.25	6.88	0.00	11.79	11.84	6.75
Lain-lain Pendapatan yang sah	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	1.87

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat, diolah



Pada tahun 2014 pajak menunjukkan peningkatan yang cukup tajam yaitu 163,97% dari tahun yang sebelumnya. Peran dana perimbangan juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010-2011 dari pos dana perimbangan, komponen bagi hasil bukan pajak menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Komponen DAU pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 21,86% dan DAK mengalami penurunan sebesar 12,89% di tahun 2014 namun pada tahun 2015 komponen DAU menunjukkan kenaikan sebesar 5,35%. Sementara DAK justru menunjukkan penurunan yang justru semakin tajam yaitu -60,59%.

Berdasarkan data tersebut, prinsipnya perekonomian Kutai Barat masih memiliki potensi yang tinggi. Hanya pada tahun 2014 kondisi perekonomian Kutai Barat mengalami sedikit guncangan, yang disebabkan oleh banyaknya komponen pendapatan yang mengalami penurunan sehingga mengganggu implementasi program yang telah disusun. Namun, tahun 2015 kondisi tersebut kembali normal yang terlihat dari kenaikan pendapatan sebesar 15,20% dari yang sebelumnya turun 20,67%.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kutai Barat

URAIAN	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
PENDAPATAN (A+B+C)	29.81	1.70	-20.67	15.20	4.80
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah	-0.39	9.60	163.97	-64.82	0.34
Retribusi Daerah	0.92	61.18	-84.95	13.00	-27.47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-7.42	14.18	1.52	-17.42	-2.98
Lain-lain PAD yang Sah	24.73	32.86	8.77	6.82	17.80
B. DANA PERIMBANGAN					
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	26.36	-3.96	-26.77	20.27	1.68
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	26.97	-13.67	-30.89	32.60	0.11
Dana Alokasi Umum	22.37	11.99	-21.86	5.35	3.06
Dana Alokasi Khusus - Non DR	50.37	43.37	-12.89	-60.59	-7.25
Dana Alokasi Khusus – DR	-	-	-	-	-
Alokasi Dana Desa	-	-	-	-	-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Hibah	-	-	-	-	-



URAIAN	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	22.15	-	-	-4.26	6.88
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-100.00	-	-	18.84	8.08
Bantuan Keuangan Provinsi	174.70	-	-	15.70	44.77
Lain-lain Pendapatan yang sah	-	-	-	-	-

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat, diolah

Rata-rata pertumbuhan per tahun total pendapatan selama 2011-2015 mencapai 4,80%. Komponen Lain-lain PAD yang sah menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17,80%. Komponen yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan per tahun yang menurun adalah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yang setiap tahun rata-rata menurun sebesar 2,98% serta retribusi yang setiap tahun rata-rata menurun sebesar 24,47%.

Kinerja keuangan APBD apabila ditinjau dari sisi lain yaitu rasio keuangan menunjukkan bahwa proporsi pajak terhadap pendapatan menunjukkan adanya fluktuasi selama 2011-2015. Pada tahun 2014 rasio pajak terhadap pendapatan menunjukkan angka yang tertinggi selama 2011-2015, yang disebabkan karena pada tahun tersebut total pendapatan mengalami penurunan yang cukup tajam, dan di saat yang sama penerimaan pajak meningkat cukup tinggi. Sebaliknya pada tahun 2015 terjadi penurunan rasio karena pada tahun 2015 pajak mengalami penurunan sementara total pendapatan justru meningkat pada tahun 2015.

Tabel 3.4.
Rasio Keuangan Daerah Kutai Barat

Jenis Rasio	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Pajak/Pendapatan	0.0088	0.0067	0.0073	0.0242	0.0074	0.0109
Retribusi/ Pendapatan	0.0057	0.0044	0.0070	0.0013	0.0013	0.0040
PAD/ Pendapatan	0.0355	0.0306	0.0393	0.0595	0.0396	0.0409
PAD/Belanja Daerah	0.0388	0.0352	0.0367	0.0583	0.0381	0.0414
RasioKetergantungan	0.8532	0.8306	0.8674	0.7240	0.7559	0.8062
RasioPotensiPendapatan Daerah	0.6042	0.5869	0.5115	0.4709	0.5130	0.5373
PAD/PDRB	0.0033	0.0032	0.0040	0.0050	-	0.0039

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat, diolah



Informasi rasio keuangan daerah juga memperlihatkan peran pajak masih fluktuatif dalam penerimaan daerah, sementara peran retribusi cenderung semakin mengecil. Secara keseluruhan peran PAD dalam pendapatan menunjukkan adanya fluktuasi sepanjang 2011-2015. Hal ini mengandung implikasi pentingnya pemetaan dan strategi dalam menggali potensi PAD sehingga tingkat fluktuasi dapat dikurangi dan memiliki tren yang terus meningkat.

Informasi rasio ketergantungan menunjukkan tingkat ketergantungan pendapatan Kutai Barat terhadap faktor eksternal, yaitu perbandingan antara DAU, DAK, dan Bantuan terhadap total pendapatan. Rasio ketergantungan menunjukkan kecenderungan yang menurun selama 2011-2015. Rata-rata rasio ketergantungan selama 2009-2013 adalah 0,8062. Hal ini mengandung arti bahwa sekitar 80,62% penerimaan Kutai Barat sangat tergantung dari provinsi dan pusat.

Rasio potensi pendapatan adalah perbandingan antara PAD dan dana bagi hasil dengan total pendapatan. Rasio tersebut menunjukkan meski berfluktuasi namun relatif sekitar 50%-60%. Hal ini mengandung arti bahwa Kutai Barat masih memiliki potensi yang cukup besar dalam menggali pendapatan dari dalam daerah. Artinya, potensi PAD masih memungkinkan untuk digali melalui kebijakan dan strategi, misal melalui pemetaan ulang dan SOWOT potensi yang ada agar rasio ketergantungan semakin kecil dan rasio potensi PAD semakin besar.

Peran PAD terhadap perekonomian tergolong sangat kecil yaitu di bawah 1% meskipun memiliki tren yang cenderung naik sepanjang 2011-2015. Hal itu terlihat dari rasio antara PAD dengan PDRB. PAD Kutai Barat belum optimal dalam menggerakkan atau memberikan stimulus perekonomian daerah. Hal tersebut dapat dipahami mengingat masih kecilnya peran PAD dalam struktur penerimaan daerah. Makna lain yang dapat diambil adalah bahwa perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal, sehingga berpengaruh dalam penerimaan PAD.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah Kabuptane Kutai Barat merupakan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi asset, kewajiban, dan ekuitas. Aset terdiri dari asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Selama kurun waktu 2012-2015 total aset Kutai Barat rata-rata tumbuh sebesar 23,66% per tahun. Dalam komponen asset lancar, sub komponen yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah kas daerah. Pada tahun 2012 kas daerah sekitar Rp1,45 milyar dan pada tahun 2015 naik drastic



menjadi Rp60,65 milyar atau rata-rata setiap tahun tumbuh sebesar 246,67%. Untuk asset tetap, sub komponen tanah menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah tanah yaitu 76,59% per tahun. Tingginya rata-rata pertumbuhan tanah ini dipengaruhi oleh dua factor yaitu nilai jual tanah atau NJOP serta penambahan luas tanah yang menjaid asset pemerintah daerah.

Tabel 3.5.
Rata-rata Pertumbuhan Komponen Neraca Daerah

Keterangan	2012	2015	Rata-rata Pertumbuhan
ASET	4,069,291,548,549.85	7,694,497,426,963.52	23.66
Aset Lancar			
Kas	1,454,376,886.00	60,649,100,630.48	246.78
Investasi Jangka Pendek			
Piutang	22,631,962,640.09	32,727,922,805.36	13.08
Piutang Lain-lain	162,202,202.00	181,620,884.00	3.84
Persediaan	2,603,795,497.77	9,368,019,119.96	53.23
Jumlah Aset lancar	26,852,337,225.86	102,926,663,439.80	56.50
Investasi Jangka Panjang		114,970,355,246.86	
Aset Tetap			
Tanah	107,098,383,095.00	589,745,191,468.66	76.59
Peralatan dan Mesin	171,005,716,026.82	517,147,518,589.78	44.61
Gedung dan Bangunan	756,394,876,798.17	1,209,657,523,583.39	16.94
Jalan, Jaringan, Instalasi	2,484,164,303,268.00	3,571,611,643,734.10	12.87
Aset Tetap Lainnya	20,007,401,923.00	58,152,193,956.00	42.71
Konstruksi Dalam Pengerjaan	482,571,258,321.00	1,480,968,636,815.07	45.32
Akumulasi Penyusutan			
Jumlah Aset Tetap	4,021,241,939,431.99	7,427,282,708,147.00	22.69
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	21,197,271,892.00	49,317,700,129.86	32.51
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	5,631,707,013.50	199,431,316,525.39	228.39
Kewajiban Jangka Panjang			
Jumlah Kewajiban	5,631,707,013.50	199,431,316,525.39	228.39
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	31,707,910,624.36	(96,437,200,690.59)	-244.89



Keterangan	2012	2015	Rata-rata Pertumbuhan
Ekuitas Dana Investasi	4,032,016,988,376.99	7,591,503,311,128.72	23.48
Jumlah Ekuitas Dana	4,063,725,911,501.35	7,495,066,110,438.13	22.64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,069,357,618,514.85	7,694,497,426,963.52	23.66

Untuk komponen kewajiban, selama 2012-2015 rata-rata pertumbuhan per tahun sangat tinggi yaitu 228,39%. Kondisi menggambarkan semakin tingginya kewajiban pemerintah daerah dalam hal utang. Tingginya utang ini merupakan konsekuensi dari pembangunan yang memang berjalan dengan intensif di Kutai Barat. Kewajiban ini menyebabkan komponen ekuitas dana lancar tahun 2015 negatif akibat adanya kewajiban memenuhi kewajiban jangka pendek di tahun 2014.

Berdasarkan informasi neraca keuangan daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yang dipergunakan adalah Rasio Lancar yang merupakan rasio antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Untuk rasio solvabilitas yang dipergunakan terdiri dari dari, yaitu rasio total utang terhadap total asset (Rasio Solvabilitas 1) dan rasio total utang terhadap total ekuitas (Rasio Solvabilitas 2). Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedangkan rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada rasio likuiditas, selama 2011-2013 menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi tiap tahun, namun rasio ini menurun sangat tajam setelah tahun 2013. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan yang sangat tajam kewajiban jangka pendek di tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Untuk rasio solvabilitas, rasio tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,0306 (total utang terhadap total asset) serta 0,0316 (total utang terhadap total ekuitas). Semakin kecil rasio ini, semakin tinggi kemampuan daerah memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya.



Tabel 3.6.
Rasio Keuangan Neraca Daerah

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Aset Lancar	16,718,350.00	26,852,337,225.86	49,748,914,915.39	204,695,491,403.90	102,926,663,439.80
Kewajiban Jangka Pendek	1,488,022,430.00	5,631,707,013.50	5,381,080,901.50	211,672,585,045.84	199,431,316,525.39
Total Utang	1,482,277,520.00	5,631,707,013.50	5,381,080,901.50	211,672,585,045.84	199,431,316,525.39
Total Aset	5,481,967,684.00	4,069,291,548,549.85	5,219,623,544,237.93	6,906,536,409,084.43	7,694,497,426,963.52
Total Ekuitas	3,999,690,164.00	4,063,725,911,501.35	5,194,031,028,292.08	6,694,863,824,038.59	7,495,066,110,438.13
Rasio Likuiditas	0.0112353	4.7680636	9.2451528	0.9670383	0.5161008
Rasio Solvabilitas 1	0.2703915	0.0013840	0.0010309	0.0306482	0.0259187
Rasio Solvabilitas 2	0.3705981	0.0013858	0.0010360	0.0316172	0.0266083

3.2. KEBIJAKAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Total belanja untuk kebutuhan pegawai sepanjang 2011-2015 secara nominal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 20,01% dan setelah itu kenaikan belanja pegawai konstan di angka 5%. Sepanjang 2011-2015 total belanja menunjukkan kecenderungan peningkatan, kecuali pada tahun 2014 terjadi penurunan total belanja sebesar 24,36%. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada pengeluaran belanja pegawai yang tetap meningkat sebesar 5,64% di tahun 2014 meskipun pada periode tersebut total belanja turun cukup tajam.

Tabel 3.7.
Proporsi Total Belanja Kebutuhan Aparatur

Tahun	Total Belanja Pegawai	Total Belanja	Proporsi Belanja Pegawai	Kenaikan (%)	
				Belanja Pegawai	Total Belanja
2011	479,365,451,419.00	1,565,621,283,750.23	30.61823	-	-
2012	575,269,271,058.67	1,930,290,934,306.34	29.80221	20.01	23.29
2013	608,621,250,665.85	2,417,045,043,794.14	25.18039	5.80	25.22
2014	642,956,741,620.09	1,828,208,959,997.45	35.16867	5.64	-24.36
2015	676,446,075,976.99	2,143,841,249,156.03	31.55299	5.21	17.26

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat, diolah

Dari sisi proporsinya, selama 2009-2013 rata-rata proporsi total belanja pemenuhan kebutuhan pegawai mencapai lebih dari 30%. Kenaikan proporsi terbesar terjadi di tahun 2014 justru di saat total belanja dan pendapatan turun. Kementerian Dalam Negeri memberikan batasan bahwa belanja aparatur maksimum 30% karena diharapkan APBD lebih banyak



proporsinya untuk belanja publik. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai cenderung belum diimplementasikan sesuai harapan karena yang cenderung konstan. Diharapkan proporsi belanja aparatur atau pegawai dapat ditekan hingga di bawah 30% agar alokasi untuk belanja publik semakin besar.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Apabila dilihat secara keseluruhan antara total pendapatan dengan total belanja, APBD Kutai Barat sepanjang 2011-2015 menunjukkan fluktuasi antara defisit dan surplus. Defisit terjadi pada tahun 2011 dan 2012, surplus tahun 2012 bahkan dua kali lipat dibandingkan surplus 2011. Sepanjang 2011-2015, defisit terjadi mulai tahun 2013 hingga 2015, dan defisit terbesar terjadi pada tahun 2013 yang mencapai sekitar Rp162milyar.

Pembiayaan defisit ditutup dengan pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya serta transfer dana cadangan. Pada tahun 2011, bila diperbandingkan dengan pengeluaran pembiayaan daerah, terjadi defisit pada pembayaran netto. Hal ini diakibatkan oleh cukup besarnya pengeluaran pembayaran pokok utang yang mencapai Rp21 milyar serta besarnya investasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Dari sisi Silpa, pada APBD terlihat besarnya Silpa APBD Kutai Barat terutama setelah tahun 2011. Besarnya Silpa bukanlah sesuatu yang buruk dan harus dihindari, namun bila dikembalikan kepada esensi APBD dan pembangunan daerah, Silpa yang tinggi dapat mencerminkan kurang optimalnya perencanaan ASB, atau kurang optimalnya perencanaan pembangunan daerah. Silpa yang tinggi dapat dinilai bahwa pemda ingin memperkuat tabungan atau saving, namun sering kali kontradiktif dengan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik atau belanja publik yang kurang optimal. Meskipun Silpa dimanfaatkan salah satunya untuk penyertaan modal, namun idealnya Silpa tersebut juga dimanfaatkan untuk belanja publik dalam rangka memperkuat aspek kesejahteraan masyarakat melalui program-program di SKPD.



Tabel 3.8.
Perkembangan Pembiayaan Daerah

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17,446,417,733.51	136,732,533,417.12	370,561,400,782.56	185,486,376,754.41	145,281,742,905.31
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,835,667,733.51	129,722,709,417.12	365,650,463,760.13	182,272,980,846.80	143,754,990,513.41
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	610,750,000.00	7,009,824,000.00	4,910,937,022.43	368,300,000.00	1,526,752,391.90
Penerimaan Kembali Investasi Daerah	0.00	0.00	0.00	2,845,095,907.61	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	42,243,534,179.03	57,701,271,713.00	25,820,000,000.00	500,000,000.00	8,900,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21,095,000,000.00	20,725,000,000.00	25,820,000,000.00	500,000,000.00	5,900,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	21,148,534,179.03	36,976,271,713.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	(24,797,116,445.52)	79,031,261,704.12	344,741,400,782.56	184,986,376,754.41	136,381,742,905.31
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	117,452,254,374.78	365,650,463,760.13	182,272,980,846.80	145,376,349,265.46	53,014,332,359.76

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat

Tabel 3.9.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kutai Barat

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Realisasi Penerimaan Daerah	1,707,870,654,570.53	2,216,910,136,362.35	2,254,576,623,858.38	1,788,598,932,508.50	2,060,473,838,610.48
Dikurangi:					
Realisasi Belanja Daerah	1,565,621,283,750.23	1,930,290,934,306.34	2,417,045,043,794.14	1,828,208,959,997.45	2,143,841,249,156.03
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	42,243,534,179.03	57,701,271,713.00	25,820,000,000.00	500,000,000.00	8,900,000,000.00
Surplus (Defisit) Riil	100,005,836,641.27	228,917,930,343.01	(188,288,419,935.76)	(40,110,027,488.95)	(92,267,410,545.55)

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat



3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Dari aspek belanja daerah, komponen belanja pegawai baik belanja langsung maupun belanja tak langsung sepanjang 2011-2015 menempati proporsi yang tertinggi yaitu sekitar 30% sedangkan komponen belanja barang dan jasa memiliki sekitar 17%. Komponen belanja tak terduga terlihat memiliki rata-rata proporsi yang kecil yaitu hanya 0,07%. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran di Kutai Barat berjalan dan direncanakan dengan baik.

Dari semua komponen belanja, belanja subsidi dan belanja bantuan keuangan meski memiliki rata-rata proporsi yang kecil, namun memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi sepanjang 2011-2015 yaitu 36,69% untuk belanja subsidi dan 48,67% untuk belanja bantuan keuangan. Belanja barang sendiri memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif yaitu -1,07% per tahun.

Tabel 3.10.
Perkembangan Belanja Daerah

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
BELANJA	1,565,621,283,750.23	1,930,290,934,306.34	2,417,045,043,794.14	1,828,208,959,997.45	2,143,841,249,156.03	1,977,001,494,200.84
BELANJA TIDAK LANGSUNG	436,081,022,780.00	513,354,533,616.40	633,189,721,417.11	572,939,048,783.26	690,642,201,711.67	569,241,305,661.69
Belanja Pegawai	272,756,652,692.00	317,864,942,322.75	404,596,273,703.14	391,132,442,993.00	409,418,404,120.99	359,153,743,166.38
Belanja Subsidi	4,313,411,576.00	11,144,280,985.65	24,724,494,979.97	11,498,171,000.00	15,057,468,521.00	13,347,565,412.52
Belanja Hibah	79,438,791,785.00	77,597,915,971.00	90,621,771,410.00	84,007,051,000.00	135,017,107,100.00	93,336,527,453.20
Belanja Bantuan Sosial	58,350,341,727.00	64,030,344,337.00	62,537,479,317.00	32,191,289,656.00	26,593,623,853.00	48,740,615,778.00
Belanja Bantuan Keuangan	21,221,825,000.00	42,717,050,000.00	47,908,275,000.00	50,919,152,693.00	103,686,039,698.68	53,290,468,478.34
Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	2,801,427,007.00	3,190,941,441.26	869,558,418.00	1,372,385,373.25
BELANJA LANGSUNG	1,129,540,260,970.23	1,416,936,400,689.94	1,783,855,322,377.03	1,255,269,911,214.19	1,453,199,047,444.36	1,407,760,188,539.15
Belanja Pegawai	206,608,798,727.00	257,404,328,735.92	204,024,976,962.71	251,824,298,627.09	267,027,671,856.00	237,378,014,981.74
Belanja Barang dan Jasa	309,509,160,773.67	351,667,608,174.17	391,301,091,547.27	302,100,334,618.11	296,508,982,140.17	330,217,435,450.68
Belanja Modal	613,422,301,469.56	807,864,463,779.85	1,188,529,253,867.05	701,345,277,968.99	889,662,393,448.19	840,164,738,106.73

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat



Tabel 3.11.

Proporsi dan Rata-rata Proporsi Belanja Daerah

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
BELANJA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.85	26.59	26.20	31.34	32.22	28.84
Belanja Pegawai	17.42	16.47	16.74	21.39	19.10	18.22
Belanja Subsidi	0.28	0.58	1.02	0.63	0.70	0.64
Belanja Hibah	5.07	4.02	3.75	4.60	6.30	4.75
Belanja Bantuan Sosial	3.73	3.32	2.59	1.76	1.24	2.53
Belanja Bantuan Keuangan	1.36	2.21	1.98	2.79	4.84	2.63
Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	0.12	0.17	0.04	0.07
BELANJA LANGSUNG	72.15	73.41	73.80	68.66	67.78	71.16
Belanja Pegawai	13.20	13.34	8.44	13.77	12.46	12.24
Belanja Barang dan Jasa	19.77	18.22	16.19	16.52	13.83	16.91
Belanja Modal	39.18	41.85	49.17	38.36	41.50	42.01

Sumber: Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat

Besarnya komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa merupakan indikasi bahwa faktor SDM serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan masih memegang prioritas penting. Selain itu hal ini juga mengindikasikan bahwa alokasi belanja untuk pengadaan barang dan jasa yang langsung menunjang kegiatan telah dilakukan secara intensif oleh Kutai Barat, dan pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan mampu mendukung efisiensi dan efektivitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Belanja bantuan sosial terlihat menunjukkan angka proporsi yang cukup tinggi namun sekaligus menunjukkan tren yang menurun.

Secara umum rata-rata kenaikan total belanja masih dalam batas yang normal dan wajar, mengingat situasi dan kondisi pembangunan di Kutai Barat yang berjalan cukup dinamis di semua aspek. Tingginya rata-rata pertumbuhan belanja modal misalnya, menggambarkan pembangunan prasarana fisik yang sangat dinamis.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas keuangan Kutai Barat di masa mendatang berdasarkan data masa lalu serta berbagai kondisi faktor internal dan eksternal. Dengan mengetahui kondisi keuangan daerah di masa mendatang, akan didapatkan gambaran tentang pendapatan dan belanja sehingga formulasi dan strategi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat disusun sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.



Proyeksi meliputi 3 hal, yaitu proyeksi pendapatan, belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Beberapa asumsi yang dipergunakan dalam proyeksi ini adalah:

1. Perekonomian Kutai Barat tumbuh antara 1% - 3,0% per tahun akibat faktor internal dan eksternal.
2. Rata-rata pertumbuhan total belanja lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan total pendapatan untuk 2-4 tahun ke depan akibat faktor internal dan eksternal.
3. Penerimaan dari pos dana perimbangan diperkirakan mengalami penurunan sesuai dengan kondisi APBN dan kondisi APBD provinsi.
4. Situasi perekonomian nasional, internasional, dan kondisi daerah secara umum, serta kebijakan yang belum mampu mendukung penerimaan pendapatan daerah secara optimal sehingga diperkirakan terjadi penurunan antara 5% hingga 10% dan situasi diperkirakan normal setelah 3-5 tahun ke depan.



Tabel 3.12.
Proyeksi Total Pendapatan dan Total Belanja

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	1,787,119,985,681	1,789,055,201,628	1,807,932,713,778	1,842,640,513,393	1,878,148,764,373	1,914,480,578,897
Belanja Tidak Langsung	665,868,030,814	672,526,711,122	685,977,245,344	706,556,562,705	734,818,825,213	771,559,766,473
Belanja Langsung	1,242,764,410,865	1,056,349,749,235	950,714,774,312	969,729,069,798	989,123,651,194	1,008,906,124,218
Total Belanja	1,908,632,441,678	1,728,876,460,357	1,636,692,019,656	1,676,285,632,502	1,723,942,476,406	1,780,465,890,691

3.3.3. Kerangka Pendanaan

Proyeksi komponen pendapatan menggambarkan sumber pendanaan selama 2016-2021. Sumber pendapatan dalam APBD adalah 3 komponen utama, yaitu: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Proyeksi ini didasarkan pada metode *leastsquare* dan rata-rata proporsi setiap komponen selama lima tahun terakhir, serta melihat kondisi APBD provinsi dan APBN nasional. Fluktuasi yang cukup tinggi dan pola yang tidak beraturan menyebabkan suatu proyeksi tidak menggunakan komponen rata-rata pertumbuhan saja, tetapi juga menggunakan metode lain agar diperoleh hasil yang lebih rasional. Hasil proyeksi 2016-2021 dari komponen pendapatan untuk pendanaan disajikan dalam *tabel 3.11*. berikut:

Tabel 3.13.
Proyeksi Beberapa Komponen Pendapatan

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	96,760,797,389.65	98,696,013,337.45	100,669,933,604.20	105,703,430,284.41	110,988,601,798.63	116,538,031,888.56
Dana Perimbangan	1,247,690,607,194.12	1,247,690,607,194.12	1,260,167,513,266.06	1,285,370,863,531.39	1,311,078,280,802.01	1,337,299,846,418.05
Lain-lain Pendapatan yang Sah	442,668,581,096.88	442,668,581,096.88	447,095,266,907.85	451,566,219,576.93	456,081,881,772.70	460,642,700,590.42